

KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SIAK DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) SIAK

Oleh : Endah Putri Haryani

endahharyaniputri@gmail.com

Dosen Pembimbing : Mimin Sundari Nst, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Riau Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293, Telp/Fax
(0761) 63277.

Abstrack

Pollution found in the Siak watershed is obtained from industrial waste with a percentage of 17.01%, activities of the Department of the Environment have not been maximized so that violations exceed quality standards, and the lack of firmness in sanctioning companies is a phenomenon which was found. The purpose of this study is to find out how the performance of the Siak Regency Environmental Office in controlling pollution and to find out the inhibiting factors of the performance of the Siak Regency Environmental Agency. Control activities that have been carried out are supervision activities. This type of research is a qualitative research with a descriptive approach. Collecting data obtained both primary and secondary data collected through interviews, observations and documentation and then analyzed so that conclusions can be drawn from existing research problems. The results of this study found that the performance of the Office of the Environment in controlling pollution has not been carried out to the maximum, it is caused by several inhibiting factors namely the ability of human resources and corporate behavior.

Keywords: Performance, Control, Pollution

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Siak memiliki salah satu potensi yaitu Sungai Siak. Sungai Siak yang termasuk ke dalam sungai strategis secara nasional dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) seluas 1.132.776,04 ha dengan panjang 572 km.

Cakupan Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak meliputi kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, Kota Bengkalis dan Kabupaten Siak, dari seluruh hilir dari masing-masing sungai. Agar lebih spesifik Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak bagian hilir Kota Siak Sri Indrapura menjadi lokus pada penelitian.

Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan kelestarian lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak mempunyai tugas dan fungsi yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan program Dinas Lingkungan Hidup
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup
3. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup
4. Pelaksanaan kebijakan teknis dan kerja sama antar daerah Dinas Lingkungan Hidup
5. Pelaksanaan tugas ke Dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pemanfaatan sungai digunakan secara berlebihan tanpa memikirkan dampak dan akibatnya. Banyak sungai yang rusak dan tercemar akibat oleh perusahaan-perusahaan atau industri yang ada disekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak. Selain berdampak pada kerusakan ekosistem sungai hal ini juga berdampak pada sektor ekonomi. Pencemaran bukan saja dilihat dari hilangnya nilai ekonomi sumber daya akibat

berkurangnya kemampuan sumber daya namun juga dari dampak pencemaran tersebut terhadap masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkannya kegiatan secara berkelanjutan oleh Dinas Lingkungan Hidup agar tetap terjaganya ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak.

Pemerintah memberikan izin untuk pembuangan hasil limbah ke tempat pembuangan limbah ke sumber air. Berikut data perusahaan yang memiliki izin dalam pembuangan air limbah ke sumber air di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

Tabel 1.1 Daftar Perusahaan di Sekitar Sungai Siak Kabupaten Siak yang Memiliki Izin Pembuangan Limbah ke Sungai Siak

No	Nama Perusahaan	Alamat	Bidang Usaha
1	PT. PN V PKS Lubuk Dalam	Desa Lubuk Dalam Kec. Lubuk Dalam Kab. Siak	Pabrik Kelapa Sawit
2	PT. Teguh Karsa Wana Lestari (TKWL)	Kec. Bunga Raya Kab. Siak	Pabrik Kelapa Sawit
3	PT. Anugrah Tani Makmur	Desa Meredan Kec. Tualang Kab. Siak	Pabrik Kelapa Sawit
4	PT. Sri Indrapura Sawit Lestari	Kerinci Kiri Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak	Pabrik Kelapa Sawit
5	PT. Indah Kiat Pulp and Paper	Jl. Raya Minas - Perawang KM.26, Pinang Sebatang, Perawang, Pinang Sebatang, Tualang, Kabupaten Siak	Industri Pulp and Paper
6	PT. Panca Eka Bina Plywood Industri	Desa Merempan Kec. Siak Kab. Siak	Produk Usaha Plywood

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak

Dari tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa terdapat 6 (enam) industri yang memiliki izin dalam pembuangan air limbah dengan media penerima air limbah ke sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Oleh sebab itu diperlukan kegiatan pengendalian pencemaran oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak terhadap limbah yang di buang ke sumber air sehingga tingkat pencemaran di sumber air dapat di antisipasi.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak telah melakukan penanganan kasus pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak di beberapa perusahaan, berikut beberapa nama

perusahaan yang sudah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak:

Tabel 1.2 Data Sanksi dan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Tahun 2016-2018

Nama Perusahaan	Alamat	Keterangan	Sanksi
PTPN V Sungai Buatan	Desa Sawit Permai, Kec. Dayun, Kab. Siak	Terjadiya pencemaran terhadap Sungai Buatan yang merupakan sumber MCK masyarakat Kec.Koto Gasib dan sekitarnya	Sanksi Administratif (teguran)
PT Libo Sawit Perkasa	Kec. Kandis, Siak	Kasus mengenai luberan air limbah oleh PT. Libo Sawit Perkasa yang mengakibatkan banyak ikan mati di pinggir sungai	Sanksi Administratif (teguran)
PT Sri Indrapura Sawit Lestari	Kec. Kerinci Kanan	Baku mutu limbah cair ke sungai melewati standar baku mutu	Sanksi Administratif (teguran)

Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak Tahun 2016-2021

Berdasarkan tabel 1.2 bahwasanya terdapat beberapa data sanksi dan penanganan kasus pelanggaran yang sudah ditangani Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh beberapa perusahaan yang ada sekitaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak bagian hilir, pelanggaran yang dilakukan berupa pembuangan limbah pabrik ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak yang menimbulkan bau dan tercemarnya Daerah Aliran Sungai Siak. Sanksi yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup yaitu sanksi administratif berupa surat teguran yang diberikan. Sanksi administratif berupa teguran ini diberikan bahwa pihak perusahaan harus segera memperbaiki kesalahan yang dilakukan dengan batas waktu tertentu.

Untuk terwujudnya Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak yang terkendali secara berkelanjutan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak melakukan kegiatan pengendalian pencemaran yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan pengawasan administrasi dan kegiatan pengawasan

secara langsung. Kegiatan pengawasan administrasi ini antara lain yaitu pengawasan terhadap izin pembuangan air limbah, pengawasan izin *land application* dan pengawasan izin limbah B3. Kegiatan pengawasan ini sangat penting dilakukan mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyimpangan yang terjadi dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Sedangkan bentuk kegiatan pengawasan langsung berupa seperti pengecekan langsung ke lapangan atau melakukan pengecekan pada pengelolaan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada.

Kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak disamping melakukan pengawasan penataan dan pemantauan yaitu kegiatan pengecekan yang dilakukan pertahun untuk melaksanakan pengukuran uji sampel pada daerah aliran sungai (DAS) Siak. Kegiatan ini dimaksud guna mengetahui beban pencemaran air Sungai Siak.

Adapun beberapa fenomena yang peneliti temukan yang tidak sesuai dengan harapan sehingga membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini antara lain:

1. Ditemukannya pencemaran sungai dari limbah industri 17,01 %.
2. Keterbatasannya petugas lapangan dalam melakukan kegiatan pengendalian pencemaran untuk menghasilkan kinerja yang optimal, hal ini dapat menghambat proses kinerja.
3. Belum maksimalnya kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak sehingga masih ada terjadinya kasus pelanggaran terhadap pembuangan limbah yang melewati standar baku mutu di Sungai Siak.

Berangkat dari situasi dan kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian tentang penengdalian pencemaran khususnya pada pengendalian pencemaran sungai di wilayah Kab Siak yang berjudul ***“Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak.”***

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah di jelaskan maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak terhadap pengendalian pencemaran daerah aliran sungai (DAS) Siak?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam pengendalian pencemaran daerah aliran sungai (DAS) Siak tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup terhadap pengendalian pencemaran daerah aliran sungai (DAS) Siak.
2. Untuk mencari dan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam pengendalian pencemaran daerah aliran sungai (DAS) Siak.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan penelitian khususnya bidang Administrasi Publik, terutama untuk pengembangan teori-teori kinerja organisasi dan pengendalian pencemaran.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan koreksi bagi Instansi terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan

berguna dalam menambah referensi kepustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya program studi Administrasi Publik. Sebagai bahan acuan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak.

2. KONSEP TEORI

2.1 Kinerja

Ruky (2004:14) mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kinerja merupakan adalah pengalihbahasaan dari kata Inggris “*performance*”, kata *performance* itu sendiri mempunyai tiga arti kata yaitu: “*prestasi*”, “*pertunjukan*”, dan “*pelaksanaan tugas*.”

Sementara itu menurut pendapat **Mahsun (2006:25)** kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategik planning* organisasi.

Bernadin dan Rusel dalam Ruky (2002:15) memberikan definisi tentang *performance* seperti berikut “*Performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time periode* (prestasi adalah catatan dari hasil-hasil yang diperoleh dari fungsifungsi pekerjaan dalam kurun waktu tertentu).”

Jakson dan Morgan dalam Riawan (2005:38) mengemukakan pendapat bahwa kinerja pada umumnya menunjukkan tingkat tujuan yang ingin dicapai. Sementara Pamungkas juga masih dalam buku yang sama menjelaskan bahwa kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan sesuatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu unjuk kerja.

Kinerja oleh **Lembaga Administrasi Negara dalam Widodo (2001:60)** diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan

dalam mewujudkan sasaran visi misi organisasi.

Sementara itu **Prawirosentono (1999:2)** mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. Suatu kinerja sangat penting untuk dinilai atau diukur agar suatu organisasi atau program dapat diketahui keberhasilannya.

Hal ini sesuai dengan pendapat **Mahmudi (2005:6)** bahwa kinerja merupakan suatu konstruk yang bersifat multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung pada kompleksitas faktor-faktor yang membentuk kinerja.

Terdapat beberapa indikator yang biasanya digunakan dalam mengukur kinerja. **Dwiyanto (2006:50-51)** mengemukakan indikator-indikator yang biasa digunakan dalam menilai kinerja organisasi publik antara lain:

- a. Produktifitas
- b. Orientasi kualitas layanan
- c. Responsifitas
- d. Responsibilitas
- e. Akuntabilitas

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bersifat deskriptif. **Bogdan & Taylor** dalam **Moeloeng (2007:4)** mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dan partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan

menafsirkan makna data.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak yang beralamat di Sungai Mempura Kabupaten Siak. Untuk lokasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak peneliti fokus di sub daerah aliran sungai bagian hilir yaitu kota Siak Sri Indrapura.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* dengan informannya sebagai berikut :

1. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
2. Kepala Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Kepala Seksi Pengawasan dan Pemantauan Lingkungan.
5. Kepala Humas PT TKWL (Teguh Karsa Wana Lestari).
6. Masyarakat Kecamatan Bungaraya dan Kecamatan Dayun.

3.4 Jenis Data

a. Data Primer

Menurut **Siyoto & Sodik (2015: 67)**, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer ini didapatkan dengan cara observasi lapangan dan wawancara informan yang dalam hal ini mewawancarai pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengendalian pencemaran daerah aliran sungai (DAS) Siak.

b. Data Sekunder

1. Undang Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Pencemaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran.
3. Peraturan Bupati Siak Nomor 71 Tahun 2006 tentang kedudukan, fungsi dan

tata kelola Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Pencemaran.

4. Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
5. Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
6. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
7. Standar Prosedur Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara semi-terstruktur, alasan menggunakan metode ini adalah agar dalam proses wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi dari informan berjalan dengan sistematis dan informan pun dapat menyampaikan informasi mengenai pengendalian pencemaran daerah aliran sungai Siak (DAS) Siak lebih leluasa dan bebas dengan caranya sendiri tanpa harus dibatasi dengan daftar pertanyaan yang peneliti buat.

b. Observasi

Menurut **Idrus (2009: 101)** observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan dengan cara turun secara langsung ke lapangan/lokasi penelitian di Kabupaten Siak untuk mengetahui atau mengamati seputar pengendalian pencemaran yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Kemudian data yang

didapat dari hasil observasi tersebut selanjutnya dianalisis.

c. Dokumentasi

Pelaksanaan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data dan informasi melalui benda-benda seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, catatan, dan sebagainya yang dalam penelitian ini seperti: Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dan informan yang lain.

3.6 Analisis Data

Huberman dan Miles dalam **Idrus (2009: 147-148)** mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu (1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Data atau informasi yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang sesuai dengan fenomena yang terjadi kemudian dirangkum dan dikategorikan sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di lokasi penelitian mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran daerah aliran sungai (DAS) Siak untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data. Penyajian data menurut **Miles dan Huberman** dalam **Idrus (2009: 151)** sebagai informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lokasi penelitian disajikan dalam bentuk catatan hasil wawancara, catatan observasi lapangan dan catatan dokumentasi kemudian disusun agar memudahkan peneliti dalam memahami

apa yang terjadi sesuai dengan fenomena dan apa yang harus dilakukan oleh peneliti serta agar peneliti dapat melakukan analisis dengan cepat dan mudah. Data yang didapatkan dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, PT. Teguh Karsa Wana Lestari dan masyarakat sekitar Kecamatan Bungaraya dan Dayun Kemudian disajikan dalam bentuk tulisan berdasarkan hasil informasi yang didapat.

Tahap akhir dari model interaktif adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Tahap ini dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan yang didukung dengan hasil dari pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan yang ditarik adalah jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti di awal dan jawaban dari pertanyaan pertanyaan mengenai Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam pengendalian pencemaran daerah aliran sungai (DAS). Kemudian kesimpulan ditarik oleh peneliti melalui proses verifikasi agar kesimpulan yang ditarik benar-benar merupakan kesimpulan final.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak

4.1.1 Produktivitas

Produktivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam pengawasan dapat diketahui dari kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya dan upaya pengawasan pengendalian pencemaran.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak mengawasi enam perusahaan yang memiliki izin pembuangan limbah ke sungai. Pelaksanaan pengawasan pencemaran daerah aliran sungai bagian hilir, Dinas lingkungan

Hidup lebih berfokus pada limbah pabrik di Kabupaten Siak. Bentuk pengawasan yang diberikan oleh petugas yang berinteraksi langsung dengan perusahaan melalui standar pengawasan yang telah ditetapkan.

Waktu pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Siak dilakukan secara berkala, yang pelaksanaannya perenam bulan sekali dengan sistem pengawasan secara langsung yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terjun langsung ke kelapangan melihat kondisinya.

Dinas Lingkungan Hidup dalam usaha pengendalian pencemaran juga melakukan pengawasan langsung ke daerah aliran sungai (DAS) bagian hilir. Kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan pengecekan langsung ke daerah aliran sungai. Tujuan kegiatan pengawasan ke sungai ini adalah :

1. Tercapainya kualitas sungai yang baik sehingga dapat meningkatkan fungsi sungai.
2. Terciptanya sistem kelembagaan yang mampu melaksanakan pengendalian pencemaran air secara efektif dan efisien.
3. Terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dan penanggung jawab kegiatan industri dalam pengendalian pencemaran sungai.

Pengawasan langsung ke daerah aliran sungai (DAS) Siak hilir dilakukan secara berkala dengan waktu 1 (satu) kali dalam setahun. Waktu pengawasan tentunya kurang mengingat keadaan sungai yang sangat perlu diperhatikan. Kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan langsung yaitu pengambilan sampel dan dilakukan pengecekan di laboratorium. Namun, kegiatan pengawasan langsung ke sungai masih adanya kendala yaitu waktu pengawasan yang relatif kurang dan juga keterbatasan sarana dan prasarana seperti laboratorium untuk melakukan pengecekan sampel sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan uji sampel tersebut.

4.1.2 Kualitas Layanan

Pemberian layanan Dinas Lingkungan Hidup yang baik dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki secara efektif didayagunakan untuk melayani kepentingan masyarakat dalam pengendalian pencemaran. Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik masyarakat umum maupun perusahaan pabrik dengan memberikan petugas berkompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga kegiatan pengendalian pencemaran dapat efektif.

Penyelenggaraan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran yaitu penyelenggaraan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan seperti contoh izin perlindungan perusahaan dalam pembuangan limbah cair ke sungai dan pemanfaatan limbah sawit ke tanah. Hal ini dilakukan untuk masyarakat yang ingin membuat izin usaha dengan pembuangan limbah sawit sehingga pencemaran dapat terkendali. Pelayanan izin usaha ini dilakukan dalam upaya memberikan kemudahan dan agar terlindunginya izin usaha yang dibuat oleh masyarakat. Sehingga usaha tersebut memiliki perlindungan dari pihak yang berwenang.

Pemberian pelayanan dalam pembagian tugas mutlak dilakukan dalam organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan dan demi kepentingan masyarakat. Proses pembagian tugas dalam pengawasan limbah pabrik tidak ada kendala atau masalah yang menghambat proses pengawasan. Tim pengawasan yang turun ke lapangan merupakan gabungan dari beberapa bagian yang bersangkutan terkait pencemaran lingkungan. Kegiatan pengawasan dilakukan dalam pengendalian pencemaran agar kualitas pelayanan yang diberikan dapat optimal dengan pembagian tugas yang jelas.

Kegiatan lain guna memberikan kepuasan pelayanan yang dilakukan yaitu

berupa sosialisasi yaitu berupa pemberitahuan dan pelatihan. Sosialisasi yang dilakukan berupa pembinaan ulang kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran yang dilakukan demi memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik masyarakat umum maupun perusahaan pabrik dengan melakukan pembagian tugas mutlak sesuai dengan kemampuan dan juga melakukan sosialisasi kepada perusahaan namun tidak ada sosialisasi kepada masyarakat setempat. Meskipun perusahaan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menjelaskan bahwa sudah ada izin dari Dinas Lingkungan Hidup tetapi masyarakat tetap menolak dikarenakan masyarakat merasa adanya kerugian terhadap hal tersebut. Oleh sebab itu, Dinas Lingkungan Hidup harus lebih memperhatikan hasil limbah pabrik sehingga masyarakat tidak beranggapan bahwa limbah pabrik hanya memberikan dampak negatif tetapi juga memberikan dampak positif bagi daerah kabupaten Siak.

4.1.3 Responsivitas

Responsivitas yaitu kemampuan Dinas Lingkungan dalam melaksanakan kinerjanya untuk mengatasi, menanggapi, memenuhi kebutuhan, keluhan dan aspirasi masyarakat dalam upaya pengendalian pencemaran. Responsivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak diukur dari tingkat penanganan atas keluhan dan tuntutan masyarakat pengguna jasa terhadap pengendalian pencemaran.

Terkait dengan responsivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak memberikan waktu kepada pihak perusahaan yang melakukan kesalahan atau pelanggaran untuk memperbaiki apa yang tidak sesuai sebelum diberikan surat peringatan tertulis. Dalam tahapan ini pelaku perusahaan industri juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi.

Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran juga menerima menerima laporan/pesan dari masyarakat yang

melakukan pengaduan mengenai tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak pencemaran sungai yang dimana masyarakat atau pihak lain bisa datang langsung ke tempat Dinas Lingkungan Hidup. Apabila Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak terkait pencemaran pengelolaan limbah pabrik mendapat pengaduan akan ditindak lanjuti untuk pengecekan dan pengambilan sampel agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk melihat hasil pengelolaan yang telah dilakukan sesuai atau tidaknya dengan SOP yang telah ditetapkan.

4.1.4 Responsibilitas

Responsibilitas disini dilihat dari pelaksanaan pengendalian pencemaran daerah aliran sungai (DAS) Siak ini dalam pelaksanaannya sudah dilakukan sesuai dengan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar. Maka dari itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam pengendalian pencemaran dapat dilihat dari kejelasan wewenang dan tanggung jawab, yaitu tugas yang dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran.

Dalam melaksanakan program kerja setiap bidang sudah ada pertanggungjawaban dalam pelaksanaan. program kerja yang akan dilaksanakan sudah diatur melalui Peraturan Bupati Siak Nomor 65 tahun 2016 tersebut sudah dibuat tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang yang menanggung jawabkan setiap kegiatan program kerja tersebut, jadi penetapan kegiatan ataupun rencana itu semua sudah diatur dalam Peraturan Bupati Siak dan diturunkan pada setiap bidang yang menanggungjawabkannya. Secara umum tugas yang menanggung jawabkan program kerja mengenai pengendalian pencemaran yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan program Dinas Lingkungan Hidup

2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup
3. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia Dinas Lingkungan Hidup
4. Pelaksanaan kebijakan teknis dan kerja sama antar daerah Dinas Lingkungan Hidup
5. Pelaksanaan tugas ke Dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Semua tugas pokok dan wewenang tiap bidang maupun seksi telah tercantum dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 65 tahun 2016 sebagai acuan dalam bekerja. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak memiliki wewenang, tanggung jawab dan kesesuaian tugas dalam hal pengendalian pencemaran daerah aliran sungai (DAS) Siak.

4.1.5 Akuntabilitas

Keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan tidak terlepas pada Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Siak itu sendiri di dalam menetapkan satu cara melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan. Atas dasar itu semua di dalam pencapaian sasaran dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran yang berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 65 Tahun 2016 sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah ditetapkan di masing-masing bidang. Sementara itu dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Siak membuat program untuk pemenuhan target kegiatan. Kegiatan tersebut merupakan capaian kinerja yang terdiri dari beberapa program. Keberhasilan dalam melaksanakan tugas dapat memacu motivasi dari para karyawan.

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak untuk lebih meningkatkan kemampuannya. Dalam hal ini diperlukan kontrol dan dari pimpinan sehingga tugas dan

pekerjaan yang dilaksanakan oleh bawahan tetap sesuai dengan tugas dan kewajibannya sehingga program-program dari Dinas Lingkungan Hidup akan terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam menerapkan pelimpahan kewenangan dari Bupati tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak melakukan kegiatan pengendalian pencemaran dengan pembagian tugas kepada pegawai sesuai seksi yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak masing menggunakan pola yang lama yaitu pertanggungjawaban hanya disampaikan kepada pemberi kebijakan sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui secara langsung dan menyebabkan kurang transparannya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

4.2 Faktor Penghambat Manajemen Bencana Banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar

1. Kemampuan Sumber Daya Manusia

Kemampuan sumber daya manusia yang dimaksud disini adalah kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak. Kemampuan yang dimiliki oleh pekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tidak sesuai dengan kualifikasi dan tidak sesuai dengan kemampuan yang diperlukan di Dinas Lingkungan Hidup.

Sumber daya manusia dalam melaksanakan pengendalian pencemaran sangatlah penting karena SDM merupakan penggerak atau yang melaksanakan tindakan-tindakan dalam proses manajemen bencana tersebut, apabila tidak memiliki SDM bagaimana bisa pengendalian pencemaran dilaksanakan dengan baik. Begitu pula dengan kemampuan SDM nya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Siak mempunyai kualifikasi yang mumpuni di segi fisiknya begitu juga mentalnya agar kinerja yang dilaksanakan lebih maksimal dan lebih efektif. Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sangat berat dalam hal pengendalian pencemaran, oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut.

2. Perilaku Industri

Perilaku industri juga dapat diartikan kesadaran pihak industri itu sendiri sebagai pengelola industri dalam memahami dan mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan atau yang sudah ada dan juga memahami bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya industri pabrik yang tidak sesuai dengan prosedur yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Perilaku perusahaan menjadi faktor penentu dalam hal ini.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak dalam pengendalian pencemaran belum optimal. Ditinjau dari produktivitas, orientasi kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan masih banyak didapati pabrik industri yang masih melakukan penyimpanan-penyimpanan dalam pengelolaan limbah dan juga masih meresahkan masyarakat sekitar lokasi industri. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang telah dilakukan. Pengelolaan limbah pabrik telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Juga diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, sebagai alat ukur standar dalam melakukan pengelolaan limbah industri. Namun dalam pelaksanaan masih adanya beberapa pabrik industri yang

melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di Kabupaten Siak. Kelemahan dalam pengendalian pencemaran terhadap limbah industri ini belum adanya standar waktu yang efektif dalam kegiatan pengendalian pencemaran seperti pengawasan langsung kelapangan dan juga belum adanya sosialisasi yang dilakukan dan juga sanksi yang belum tegas terhadap perusahaan industri.

Faktor yang menghambat kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak adalah sumber daya manusia dan perilaku industri sehingga pengendalian pencemaran yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhambat. Sumber daya manusia juga dapat mempengaruhi dalam kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang dilakukan seperti kualitas petugas dan jumlah petugas yang mendukung dalam melakukan tindakan pengendalian pencemaran karena apabila petugas tidak mempunyai kualitas maka tingkat keberhasilan dalam melakukan pengendalian pencemaran akan kecil dan juga dalam menungjang kegiatan pengendalian pencemaran dan perilaku industri sebagai pendukung dalam kegiatan pengendalian pencemaran juga tidak kalah pentingnya yang dimana peran dari perilaku industri baik dan buruknya akan menjadi faktor pendukung keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan diatas, penulis memberikan saran atau masukan-masukan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup sebaiknya melakukan peningkatan kegiatan usaha pengendalian pencemaran sehingga kinerja yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dapat efektif. Seperti menambah kegiatan usaha dalam pengendalian pencemaran, memberikan respon terbaik dalam kasus pelanggaran dan

memberikan sanksi yang lebih tegas kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan program dan tanggungjawab yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup.

2. Perlu dilakukannya kegiatan penyuluhan terkait pengendalian pencemaran kepada masyarakat baik masyarakat umum maupun industri sehingga lebih paham tanggung jawab sebagai masyarakat pengguna jasa dan lebih mengerti penggunaan sungai secara berlebihan dapat meningkatkan kadar pencemaran sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengendalian pencemaran dan lebih paham lagi dengan kegiatan pengendalian pencemaran melalui penyuluhan. Komunikasi yang baik antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dan perusahaan juga dapat memicu kinerja para pegawai agar lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bachtiar, T. (2015). *Organisasi Sektor Publik*. Academia, 22. Bayumedia Publishing
- Creswell, Jhon. W. (2016). *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus. (2006). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Fauzi, A. (2004). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Idrus, M. (2009). *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi, (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Muhammad, Arni. (2015). *Komunikasi Organisasi* (1st ed.). Jakarta: Bumi Aksara.

- Nasution, Mimin Sundari. (2016). *Perilaku Organisasi*. Pekanbaru: UR Press.
- Prawirosentono, Suyadi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Karyawan. Yogyakarta:BPFI
- Riawan, Tjandra dkk. (2005). *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Kontrol Birokrasi*. Surabaya. PT Insan Cendekia.
- Ritonga, Husnun. Jauhari. (2015). *Manajemen Organisasi Pengantar Teori Dan Praktek*. Medan: Perdana Publishing.
- Ruky, Achmad.S. (2002). *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka
- Wardana, Wisnu Arya. (1995). *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta.
- Widodo, Joko. (2005). *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Novian, Muhammad. (2015). Efektifitas pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Balaraja Kabupaten Tangerang.
- Sulaiman, Muhammad. (2018). Pengawasan Pecemaran lingkungan (Studi Kasus Limbah Industri Sawit Di Kabupaten Indragiri Hulu). Administrasi Publik.

Jurnal:

- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengendalian Pencemaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran.
- Peraturan Bupati Siak Nomor 65 Tahun 2006 tentang kedudukan, fungsi dan tata kelola Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Pencemaran.

- Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak.
- Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak

Skripsi:

- Mukaroni, A. (2017). Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Sagu Industri di Kabupaten Kepulauan Meranti. Ilmu Pemerintahan.